

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abdurrahman. (2004). *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Arie S., H. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia: Jakarta. 2005.
- Asih, R., D. (2016). *Penyelesaian Problem Agraria Asas Keterbukaan dalam Pengadaan Tanah Efektifitas Larasita Pemberdayaan Petani Konsep Ruang Tanah Adat dan Deformasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Cansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Elza, S. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarkta: pustakaan Populer Gramedia.
- Fengki. (2020). *Kepastian Hukum Tentang Penegakan Hukum Terpadu Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014*, Padang: (Tesis) Universitas Andalas.
- Halkis. (2008). *Revitalisasi Hak Ulayat Tantangan atau Peluang*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Hayatul, I. (2017). *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Herman, S. (2012). *Filosofi Asas Ajaran Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- I Gede, D., A, I Nyoman, P., B. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Julius, S. (2018). *Dinamik Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.

- Koes, W., Haryo, B. (2019). *Rekontruksi Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional.
- Laila, R., Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.
- Laksanto, U. (2020). *Buku Ajar Hukum Agraria*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Mahfud, M., D. (2011). *Politik Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marulak, T. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press.
- Muhaimin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ronald, S. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ronny, H., S. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Mixed Methods, Serta Reseach & Depelopment)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthon, M. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Syiais, N. (tth). *Hak Guna Usaha Atas Tanah*. Mataram: Academia Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Mataram Fakultas Hukum.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No : 3/Pdt. G/1999/PN. Cms.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 324/Pdt/1999/PT.Bdg., hlm. 31.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2242 K/Pdt./2000., hlm. 38.

#### **Artikel:**

Arina, N., S., Marie R., R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat: *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. IV (1).

Darwin, G. (2021). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 4 (1).

Dessy, Lucky, dan Oemar, M. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria: *Jurnal Kertha Patrika*. 41 (3).

Halida, Z. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Indonesia: *Datin Law Jurnal*. 2 (1).

- Hariyanto. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pencasila: *Jurnal Ilmu Hukum Volkgeist*. 1 (1).
- Inas, Z., S., Farina, F., E. (2022). Menakar Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Perkebunan Sawit DI Kalimantan Selatan): *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3 (3).
- Indri, H. (2014). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah: *Jurnal Ahkam*. 2 (1).
- Mahrta, A., L. (2016). Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha: *Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2 (1).
- Masitah, P. (2019). Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) Di Indonesia: *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. 2 (2).
- Muslim, A., Y. (2016). Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam: *Prosiding Seminar Nasional*. 02 (1).
- Saniah. (2021). Kajian Normatif Eksistensi Hak Ulayat Pasca Di Undangkan UUPA No. 5 Tahun 1960: *Jurnal Ilmiah Kohesi*. 5 (3).
- Syahrul, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata: *Jurnal Hikmah*. 15 (1).
- Tony, P. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang: *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. 18 (02).
- Yosep, H., P. Nessa, F., F. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional: *Jurnal Review Of Justisia*. 1 (1).

**Karya Tulis Ilmiah**

- Muhamad, I. (2020). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Pengiriman Jual Beli Online Via Ekspedisi JNE Dihubungkan Dengan Pasal 26 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ronald, A. (2008). *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulaya Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro.

**Sumber Elektronik :**

- Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Ciamis, (2022), *Kesbangpol Ciamis*, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 16.23.  
<https://kesbangpol.ciamiskab.go.id/daftar-kecamatan-di-kabupaten-ciamis/>.
- Mutiara, P.A. (2010), *Hukum Online*, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 09.21. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522>.